

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Garner, Bryan A., 2004, *Black's Law Dictionary 8th Edition*, Thomson/West, Minnesota.
- Huda, Ni'matul, 2013, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung.
- Indrayana, Denny, 2008, *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002 An Evaluation of Constitution Making In Transition*, Kompas Book Publishing, Jakarta.
- Joeniarto, 1982, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Manan, Bagir, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- _____, 2008, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Santoso, Agus, 2013, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Strong, C.F. 1963, *A History of Modern Political Constitutions*, G.P. Putam's Sons, London.
- Tim Penyusun, 2007, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Jakarta.

Tim Penyusun, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Buku I*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta

_____, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Buku II*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

_____, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Buku IV*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Tim Hukum Kementerian Dalam Negeri, 2011, Naskah Akademik RUU Pemerintahan Daerah, *Naskah Akademik*, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Artikel Jurnal

Ali, Mahrus, “Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum Yang Progresif”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 1 Februari 2010.

Broadbent, Jeffrey, "State as Process: The Effect of Party and Class on Citizen Participation in Japanese Local Government", *Social Problems*, Vol. 35 No. 2 April 1988.

Ferrazi, Gabriel, “Using the "F" Word: Federalism in Indonesia's Decentralization Discourse”, *Publius*, Vol. 30 No. 2 Spring 2000.

Jati, Wasisto Raharjo, “Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Desentralisasi atau Sentralisasi”, *Jurnal Konsittusi*, Vol. 9 No.4 Desember 2012.

Perwira, Indra, “Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Bandung, Vol.2 No. 3 Juni 2015.

Rosadi, Otong, “Konstitusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Suatu Eksperimen yang Tidak Kunjung Selesai”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.3 Juni 2015.

Stenberg, Carl W., “Citizens and the Administrative State: From Participation to Power”, *Public Administration Review*, Vol. 32 No. 3 Mei 1972.

Wibowo, Mardian, “Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2 No. 2 Juni 2015.

Wilson, David, "Exploring the Limits of Public Participation in Local Government", *Parliamentary Affairs*, Vol. 52 April 1999.

Wróblewski, Jerzy, “Legal Language and Legal Interpretation”, *Law and Philosophy*, Vol. 4 No. 2 Agustus 1985.

Yusdianto, “Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 3 Juni 2015.

Hasil Penelitian

Tim Hukum Kementerian Dalam Negeri, 2011, Naskah Akademik RUU Pemerintahan Daerah, *Naskah Akademik*, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Makalah/Pidato

Bagir Manan, “Politik Hukum Otonomi Daerah Sepanjang Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah”, *Makalah*, Seminar Nasional Ketatanegaraan Penyelenggaraan otonomi Daerah dan Demokratisasi di Indoensia pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 5 Februari 1994.

Internet

Judith Berling, “Confucianism”, <https://asiasociety.org/education/confucianism>, diakses 20 Februari 2019.

Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), <https://kbbi.web.id/sendiri>, diakses tanggal 31 Oktober 2018.

Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), <https://kbbi.web.id/otonomi>, diakses tanggal 1 November 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2778).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Peraturan Pemerintah Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 225).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Maret, 2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 19 Mei 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 5 April 2017.